

**LANDASAN SEJARAH, SOSIOLOGIS DAN POLITIS KONSEP WAWASAN
NUSANTARA DALAM MEMPERSATUKAN KEBERAGAMAN
BANGSA INDONESIA**

Akmal Rayhan ¹⁾, Diniatul Syifa Fatihah ²⁾, Fasya Fauzia ³⁾, Salwa Salsabila ⁴⁾, Taun ⁵⁾

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Correspondence

Email: 2310631050066@student.unsika.ac.id¹, No. Telp:
2310631050074@student.unsika.ac.id²,
2310631050022@student.unsika.ac.id³,
2310631050110@student.unsika.ac.id⁴,
taun@fh.unsika.ac.id⁵

Submitted 7 Mei 2024

Accepted 13 Mei 2024

Published 14 Mei 2024

ABSTRACT

Wawasan Nusantara is the basic concept of the Indonesian state which has a strong historical, sociological and political foundation. Historically, this concept is rooted in the history of the struggle for independence and the formation of a unitary state in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Sociologically, Wawasan Nusantara reflects the socio-cultural diversity of Indonesian society which consists of various tribes, religions, races and groups, but is still connected into one whole. Politically, Wawasan Nusantara is the basis of Indonesia's efforts to strengthen national unity and territorial sovereignty as an archipelagic country. The essence of Wawasan Nusantara is to view Indonesia as a territorial, political, socio-cultural, economic, defense and security unit. This concept reflects the integrity and integrity of the Indonesian archipelago which is composed of various elements but remains one unit. The urgency of Archipelago Insight for Indonesia is very high, especially considering the dynamics of life that continue to develop and the challenges that change over time. Wawasan Nusantara is a visionary foundation for efforts to strengthen national integration, regional sovereignty and development in various areas of life.

Key Words: *Social Cultural; Regional Sovereignty; Politics.*

ABSTRAK

Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar negara Indonesia yang memiliki landasan sejarah, sosiologis, dan politik yang kuat. Secara historis, konsep ini berakar pada sejarah perjuangan kemerdekaan dan terbentuknya negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sosiologis, Wawasan Nusantara mencerminkan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap terhubung menjadi satu kesatuan. Secara politis, Wawasan Nusantara merupakan landasan upaya Indonesia memperkokoh persatuan nasional dan kedaulatan wilayah sebagai negara kepulauan. Hakikat Wawasan Nusantara adalah memandang Indonesia sebagai satu kesatuan teritorial, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Konsep ini mencerminkan keutuhan dan keutuhan kepulauan Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur namun tetap satu kesatuan. Urgensi Wawasan Nusantara bagi Indonesia sangatlah tinggi, apalagi mengingat dinamika kehidupan yang terus berkembang dan tantangan yang berubah seiring berjalannya waktu. Wawasan Nusantara merupakan landasan visioner bagi upaya penguatan integrasi nasional, kedaulatan wilayah, dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Kata Kunci: *Sosial Budaya; Kedaulatan Wilayah; Politik.*

Pendahuluan

Wawasan Nusantara sebagai konsep kolektif dan perspektif negara Indonesia dalam konteks hubungan dunia. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik dan geopolitik Indonesia yang mengedepankan kesatuan wilayah, kedaulatan, dan jati diri bangsa.

Artikel ini menelusuri sejarah perkembangan Wawasan Nusantara dari pra kemerdekaan hingga saat ini dan menganalisis relevansinya dalam menjawab tantangan global

saat ini.

Secara historis, Wawasan Nusantara lahir dari pengakuan atas keberagaman budaya, suku, dan geografis Indonesia. Konsep ini menjadi landasan terbentuknya identitas nasional dan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam konteks hubungan dunia, Wawasan Nusantara penting untuk menjaga kohesi regional, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwa Wawasan Nusantara tetap relevan dan perlu diperbarui untuk menjawab tantangan saat ini seperti ancaman pemisahan diri, sengketa perbatasan, dan persaingan politik dan ekonomi internasional.

Penguatan pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan memperkuat peran dan posisi strategis Indonesia di kancah dunia. Wawasan Nusantara mempunyai landasan sejarah, sosiologi dan politik yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Secara historis, konsep Wawasan Nusantara berakar pada sejarah perjuangan kemerdekaan dan terbentuknya negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sosiologis, Wawasan Nusantara mencerminkan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap terhubung menjadi satu kesatuan.

Secara politis, Wawasan Nusantara merupakan landasan upaya Indonesia memperkokoh persatuan nasional dan kedaulatan wilayah sebagai negara kepulauan.

Konsep Wawasan Nusantara mencakup pemahaman Indonesia sebagai entitas politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pandangan ini penting sebagai landasan visi pembangunan dan pembangunan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya saja dengan menghadirkan Wawasan Nusantara dalam kehidupan perekonomian sehingga tercipta tatanan perekonomian yang benar-benar menjamin terwujudnya dan peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep fundamental bangsa Indonesia yang hakikatnya sangat penting dan mendesak. Inti dari Wawasan Nusantara adalah memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah baik dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Konsep ini mencerminkan keutuhan dan keutuhan kepulauan Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur namun tetap satu kesatuan.

Urgensi Wawasan Nusantara di Indonesia sangat tinggi, apalagi mengingat dinamika kehidupan yang terus berkembang dan tantangan yang berubah seiring perubahan zaman. Wawasan Nusantara merupakan landasan visioner bagi upaya penguatan integrasi nasional, kedaulatan wilayah, dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya saja dengan menghadirkan Wawasan Nusantara dalam kehidupan perekonomian sehingga tercipta tatanan perekonomian yang benar-benar menjamin terwujudnya dan peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, Wawasan nusantara merupakan konsep fundamental yang harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara utuh oleh seluruh wilayah bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, ini didasarkan pada kajian pustaka, yakni metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk menggali informasi yang relevan. Referensi ini berupa sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan informasi dari situs internet.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata "Wawasan Nusantara" berasal dari kata "wawasan" yang berarti pandangan dalam bahasa Jawa, dan "nusantara" yang merupakan gabungan dari "nusa" (pulau) dan "antara" (antara, relasi). "Nusa" memiliki makna kepulauan atau bangsa, sedangkan "antara" dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau relasi antara pulau-pulau.

Penggabungan kedua kata ini menjadi "nusantara" mengacu pada kepulauan yang diapit oleh laut atau bangsa-bangsa yang terhubung oleh laut. Ini diperkuat oleh sejarah penggunaan kata "nusantara" dalam konteks Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi, yang merujuk pada kepulauan di luar Jawa. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut gugusan pulau di antara dua benua dan dua samudra.

Wawasan Nusantara memiliki makna penting dalam sejarah dan pandangan identitas bangsa Indonesia, mengacu pada persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, istilah "nusantara" juga telah digunakan secara luas sebagai sinonim untuk menyebut wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan daerah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah masyarakat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, dan udaranya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, mendefinisikan Wawasan Nusantara sebagai Pandangan politik yang menyatukan bangsa dan negara yang mencapai realitas geografis sebagai negara kepulauan. Beliau adalah salah satu tokoh yang menggerakkan Wawasan Nusantara di Indonesia.

Wawasan nusantara bukan hanya sekedar istilah melainkan mencerminkan pandangan kebangsaan masyarakat di Indonesia yang dinamis dan terbentuk sepanjang perjalanan sejarah Indonesia.

Alasan Mengapa Diperlukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mengintegrasikan keragaman geografis dan batas wilayah di seluruh Indonesia, dengan tujuan menciptakan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita nasional.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan banyak perbedaan bangsa. Wawasan nusantara diperlukan untuk menyeimbangkan persepsi berbagai komunitas dan meminimalisir konflik kekerasan. Salah satu aspek wawasan nusantara adalah geopolitik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik sendiri adalah ilmu tentang faktor geografis yang berkaitan dengan ketatanegaraan (pengelolaan suatu bangsa). Dengan kata lain, geopolitik juga merupakan kebijakan suatu bangsa atau negara menurut letak geografisnya. Tidak jarang muncul konflik terkait geopolitik negara-negara di dunia.

Di era pergaulan global saat ini, Wawasan Nusantara terus menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk berperan di kancah internasional, terutama terkait isu-isu penting seperti ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup. Dan wawasan Nusantara juga sangat penting untuk dipahami dan diterapkan sebagai konsepsi dan perspektif kolektif terhadap jati diri bangsa Indonesia. Di dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung, wawasan nusantara memperkuat pemahaman kita tentang jati diri bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan, wawasan Nusantara memberikan landasan penting bagi pengembangan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain.

Tujuan dari Wawasan Nusantara adalah untuk menggalang semangat nasionalisme yang kuat di semua lapisan masyarakat, dengan menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu, kelompok, suku, atau daerah. Namun, mencapai tingkat nasionalisme yang tinggi bukanlah suatu hal yang sederhana, terutama mengingat pengaruh globalisasi saat ini yang membawa liberalisasi dan dominasi pasar bebas.

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Wawasan Nusantara

Sumber historis wawasan nusantara dimulai dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi ini menetapkan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia.

Dengan penetapan garis teritorial ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebelumnya, wilayah Indonesia ditentukan oleh *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939), yang membatasi laut teritorial hingga 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Namun, setelah Deklarasi Djuanda, laut di antara pulau tidak lagi menjadi pemisah, melainkan penghubung, karena wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas.

Konsepsi wawasan Nusantara semakin diperkuat dengan dimasukkannya Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mengarah pada pembentukan Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, serta berbagai peraturan perundangan lainnya untuk memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia.

Pada tingkat internasional, konsepsi wawasan Nusantara didorong oleh upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas wilayahnya. Pada 30 April 1982, Konferensi PBB menerima dokumen yang dikenal sebagai "*The United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS), yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia secara resmi diakui mencakup perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif yang luasnya mencapai 5,9 juta km².

Konsepsi wawasan Nusantara menekankan pentingnya laut sebagai penghubung daripada pemisah antarpulau. Ini menggambarkan perubahan paradigma dalam pandangan terhadap wilayah Indonesia, dari pemisahan menjadi penyatuan.

Sumber sosiologis wawasan nusantara dimulai dari pandangan kewilayahan, dengan Deklarasi Djuanda 1957 sebagai titik perubahan dari Ordonansi 1939, yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Awalnya, fokusnya hanya pada wilayah sebagai kesatuan geografis.

Namun, seiring perkembangan zaman, konsepsi wawasan Nusantara berkembang untuk mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta persatuan sebagai satu bangsa. Konsep ini tercermin dalam rumusan GBHN 1998 yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan bersama.

Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Bahkan, Belanda memanfaatkan politik "*divide et impera*" untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Dalam konteks kondisi sosial budaya tersebut, konsep wawasan Nusantara berkembang dari pandangan tentang kesatuan wilayah menjadi pandangan tentang persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia berusaha untuk tidak terpecah-pecah dalam banyak bangsa, dan untuk mewujudkan persatuan tersebut, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara berkelanjutan.

Semangat kebangsaan telah tumbuh sejak Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, ditegaskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan terwujud dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah ada sebelum Deklarasi Djuanda 1957, dan telah membentuk bangsa Indonesia yang merdeka.

Dalam konteks ini, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan pengalaman penjajahan yang memecah belah bangsa menjadi latar belakang tumbuhnya semangat dan tekad untuk bersatu dalam satu nasionalitas, yaitu bangsa Indonesia. Semangat bersatu awalnya muncul dalam perjuangan melawan penjajahan, dan selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Dari sudut pandang sejarah dan konteks sosial budaya Indonesia, pemahaman akan pentingnya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia menjadi jelas. Secara politis, hal ini terkait dengan kepentingan nasional yang mencakup pengembangan, pelestarian, dan pertahanan wilayah yang utuh serta persatuan bangsa yang bersatu.

Kepentingan nasional ini merupakan hasil dari cita-cita, tujuan, dan visi nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita nasional Indonesia menekankan pada terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional salah satunya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, sementara visi nasional menetapkan arah menuju masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Deklarasi Djuanda 1957 menandai awal dari konsepsi politik kenegaraan wawasan nusantara. Konsep ini kemudian dimasukkan dalam GBHN dari tahun 1973 hingga 1998, dan setelah GBHN tidak berlaku, konsep ini termasuk dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. Melalui berbagai perumusan ini, wawasan nusantara menjadi landasan bagi pembangunan kebijakan dan strategi nasional.

Telusuri sejarah GBHN dari tahun 1973 hingga 1998 dan Anda akan menemukan beragam rumusan wawasan nusantara yang menunjukkan kesinambungan dan evolusi konsep tersebut dalam kebijakan negara.

Secara keseluruhan, wawasan nusantara merupakan konsep politik kenegaraan yang penting bagi Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan wilayah, tetapi juga sebagai penjaga semangat kebangsaan dan persatuan bangsa. Tanpa konsepsi wawasan nusantara, pencapaian kepentingan nasional Indonesia, seperti terwujudnya negara yang bersatu dan berdaulat, akan menjadi lebih sulit dilakukan.

Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, inti dari konsep Wawasan Nusantara adalah "kesatuan wilayah dan persatuan bangsa" Indonesia. Wilayah tersebut harus menjadi satu kesatuan utuh, tidak terbagi-bagi oleh laut yang luas. Sejarah mencatat bahwa sebelum Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, wilayah Indonesia masih terpecah-pecah akibat dari pemerintahan kolonial Belanda, terutama dengan diterapkannya Ordonansi 1939.

Deklarasi Djuanda menjadi titik penting dalam menyatukan wilayah Indonesia menjadi kesatuan yang utuh, di mana laut tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan. Wawasan Nusantara, yang pada awalnya hanya berfokus pada aspek kewilayahan, telah berkembang menjadi konsep kebangsaan. Ini berarti bahwa Wawasan Nusantara tidak lagi hanya mempertimbangkan kesatuan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal karena keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaannya. Meskipun begitu, dengan segala keragaman ini, penting untuk memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan

Urgensi wawasan nusantara untuk mewujudkan nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang utuh. Konsepsi tersebut menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memantapkan pengelolaan sumber daya ekonomi seluruh nusantara, dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam keberagaman sosial budaya masyarakat, serta meningkatkan dan memperkuat ketahanan terhadap ancaman dan tantangan dari dalam dan luar negeri.

Esensi politik Wawasan Nusantara adalah bersatunya seluruh wilayah nusantara dalam satu sistem pemerintahan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsepsi ini menolak segala upaya pembagian wilayah dan menyatukan seluruh pulau menjadi satu sistem politik dan hukum berdasarkan konstitusi. Penerapan Wawasan Nusantara dalam ranah politik akan menghasilkan lingkungan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

Esensi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu mempersatukan seluruh potensi dan sumber daya ekonomi yang tersebar di berbagai pulau menjadi satu kesatuan ekonomi nasional Indonesia. Di antaranya pengelolaan sumber daya alam, pembangunan dan pengembangan infrastruktur perekonomian, serta penataan sistem distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah kepulauan. Penerapan Wawasan Nusantara dalam konteks ekonomi akan menghasilkan sistem ekonomi yang memberikan jaminan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Esensi wawasan nusantara sebagai upaya menyatukan keberagaman sosial budaya yang ada di nusantara ke dalam jati diri bangsa Indonesia. Meski beragam suku, bahasa, dan budaya, namun seluruh masyarakat di berbagai pulau harus bersatu dalam semangat *Binneka Tunggal Ika*. Penerapan Wawasan Nusantara dalam aspek sosial budaya akan menghasilkan sikap yang menerima segala bentuk perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan, yang diakui sebagai anugerah Tuhan baik secara batiniah maupun lahiriah.

Dengan berpijak pada esensi dan urgensi wawasan nusantara, maka negara Indonesia akan mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah nusantara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan eksistensi NKRI sebagai sebuah bangsa yang kuat.

Kesimpulan

Wawasan Nusantara merupakan konsep yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan wilayah serta bangsa. Konsep ini telah berkembang dari aspek kewilayahan menjadi konsep kebangsaan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memainkan peran kunci dalam mempersatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, yang sangat diperlukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam konteks globalisasi saat ini, Wawasan Nusantara juga menjadi penting dalam memungkinkan Indonesia untuk berperan di kancah internasional, terutama dalam isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup. Selain itu, konsep ini memperkuat pemahaman tentang identitas bangsa Indonesia di tengah dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung.

Dari sisi historis, sosial budaya, dan politis, konsep Wawasan Nusantara terus mengalami evolusi dan menjadi landasan bagi pembangunan kebijakan dan strategi nasional

Indonesia. Implementasi Wawasan Nusantara di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia diharapkan akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta masyarakat yang bersatu dalam keberagaman.

Dengan memahami esensi dan urgensi Wawasan Nusantara, Indonesia dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah nusantara dalam berbagai bidang, yang akan memperkuat eksistensi NKRI sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat.

Kesimpulan dapat digeneralisasikan sesuai dengan masalah penelitian dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

Referensi

- Akbar Ahmad Riva Faisal , Ahmad Lukman Nugraha dan Ramadani Nugraha. (2024). *Bagaimana Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia?*
- Astawa, I. P. (2017). *Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia*.
- Kemahasiswaan, D. J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. JAKARTA.
- Mulyani, I. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Eureka Media Aksara.
- Poeloengan, A. H. (2019). *Revitalisasi Pradigma Wawasan Nusantara sebagai Upaya Menghilangkan Konsepsi Benar-Salah dalam Pemilu*.